

RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN, 2026, LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2026

Laporan ini memuat hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan perangkat daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam rancangan perubahan, pendapatan daerah menjadi Rp2,905 triliun, belanja daerah meningkat menjadi Rp3,127 triliun, dan defisit sebesar Rp221,115 miliar ditutup melalui pembiayaan neto dengan jumlah yang sama sehingga struktur anggaran tetap seimbang.

Badan Anggaran memberikan sejumlah catatan penting, terutama perlunya mengoptimalkan PAD karena realisasi pendapatan dan pajak daerah masih belum optimal serta sekitar 80% pendapatan daerah masih berasal dari transfer. Banggar mendorong intensifikasi pajak dan retribusi, perbaikan basis data wajib pajak, penerapan QRIS dan e-ticketing pada titik pungutan PAD, serta evaluasi pengelolaan dan promosi pariwisata. Pada sisi belanja, Banggar menyoroti penurunan belanja bantuan sosial dan kenaikan belanja modal di tengah waktu pelaksanaan yang terbatas, sehingga perangkat daerah diminta mempercepat pengadaan dan memastikan kesiapan pekerjaan agar anggaran tidak menjadi SiLPA. Banggar juga menekankan agar program penanggulangan kemiskinan, khususnya kegiatan fisik di kantong-kantong kemiskinan, diprioritaskan sehingga anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Badan Anggaran menyerahkan tindak lanjut Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Fraksi-Fraksi DPRD sesuai mekanisme pengambilan keputusan dan persetujuan bersama dalam Tata Tertib DPRD.

Catatan:

- Laporan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen pada 7 September 2026.
- Dokumen ditandatangani oleh H. Saman selaku Ketua Badan Anggaran dan Drs. Munadi, M.Si. selaku Sekretaris Badan Anggaran.
- Dokumen terdiri atas 7 halaman.

Kata Kunci: Badan Anggaran DPRD; Perubahan APBD 2026; APBD Kabupaten Kebumen; Pendapatan Asli Daerah; Belanja Modal; Penanggulangan Kemiskinan; Pengawasan Anggaran.

SUMMARY

KEBUMEN REGENCY, 2026, REPORT OF THE BUDGET COMMITTEE OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY ON THE DRAFT REGIONAL REGULATION CONCERNING THE AMENDMENT TO THE 2026 REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

This report presents the results of deliberations by the Budget Committee of the Kebumen Regency DPRD with the Regional Government Budget Team and regional government agencies on the Draft Regional Regulation concerning the Amendment to the 2026 Regional Budget. Under the proposed amendment, regional revenue is set at approximately Rp2.906 trillion, regional expenditure increases to approximately Rp3.127 trillion, and the Rp221.115 billion deficit is fully covered by net financing, resulting in a balanced budget structure.

The Budget Committee highlights the need to optimize locally generated revenue, given that revenue and regional tax realization remain below expectations and approximately 80% of regional revenue still comes from transfers. Recommendations include strengthening tax and levy collection, improving taxpayer databases, expanding QRIS and e-ticketing for regional revenue collection, and evaluating tourism management. On the expenditure side, the Committee draws attention to reduced social assistance expenditure and increased capital expenditure within a limited implementation period. Regional agencies are therefore urged to accelerate procurement and ensure project readiness to prevent unspent funds from becoming year-end budget surpluses. The Committee also emphasizes prioritizing poverty alleviation programs, particularly physical interventions in areas with high concentrations of poverty, to ensure that public spending delivers tangible benefits to communities in need.

Following the deliberations, the Budget Committee submitted the Draft Regional Regulation to the DPRD factions for further action in accordance with the procedures governing joint approval and decision-making.

Note:

- *The report was presented at the Plenary Meeting of the Kebumen Regency DPRD on 7 September 2026.*
- *The document was signed by H. Saman, Chair of the Budget Committee, and Drs. Munadi, M.Si., Secretary of the Budget Committee.*
- *The document consists of 9 pages.*

Keywords: *DPRD Budget Committee; 2026 Amended Regional Budget; Kebumen Regency Budget; Locally Generated Revenue; Capital Expenditure; Poverty Alleviation; Budget Oversight.*